



Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya

Rania Riska Vindy Aprilia¹, Calvin Edo Wahyudi²

^{1,2}Prodi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Abstract

Received: 19 Agustus 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 27 September 2023

The Digital Population Identity Program is one of the government's efforts to reduce the use of blank e-KTPs which will be discontinued in early 2024, by the Ministry of Home Affairs. This program is carried out in RW halls to make it easier for the community to carry out this program. It is hoped that with the IKD service at the RW hall, the Surabaya Population and Civil Registry Office's target regarding the IKD service program can be achieved. This study aims to describe the implementation program of Digital Population Identity in the RW hall of the Kalirungkut Village. This study uses qualitative methods using primary and secondary data sources and data collection techniques used are observation and interviews using indicators of measurement of implementation policy theory from George C. Edwards III theory. The results of this study state that the factors that influence success in realizing the implementation of policies in the IKD program at the Kalirungkut Village Hall are good and have clear directions. The communication is good, the attitudes or attitudes that are accepted by the community are also good, then the resources in implementing the IKD service program are also very good.

Keywords: Digital Population Identity, Policy Implementation

(*) Corresponding Author: riskarania3@gmail.com

How to Cite: Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki cita cita untuk memiliki Good governance dalam menjalankan pemerintahannya. Good governance memiliki peran yang penting dalam berdirinya suatu negara, yaitu menyediakan sebuah sistem yang sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan mengikuti aturan hukum. Negara Indonesia telah berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan adanya good governance maka cita cita negara sesuai dengan Pancasila sila kelima yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” akan tercapai dan terlaksana. Penerapan Good Governance juga harus dilakukan secara menyeluruh dari pusat ke daerah hingga ke satuan Lembaga dan organisasi terkecil.

Di Indonesia yang menganut prinsip otonomi daerah, penerapan Good Governance menjadi sebuah urgensi dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), efektif dan efisien. Peluang agar pemerintah daerah mampu melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah didukung dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Sehingga prinsip – prinsip Otonomi Daerah dapat dilaksanakan pemerintah daerah tanpa bergantung pada pemerintahan

pusat (sentralistik) dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (public services) secara optimal. Dengan adanya otonomi daerah akan meningkatnya rasa keadilan secara nasional pada wilayah. Selain itu, dapat menciptakan kebijakan dan program sendiri sesuai dengan karakter kebudayaan di daerah masing masing karena telah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri.

Kota Surabaya sebagai salah satu daerah otonom, juga terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat (public services) guna mencapai Good Governance. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai tuntutan dalam menciptakan good governance maka pemerintah wajib melakukan pelayanan dan peningkatan terhadap pelayanan publik. Pelayanan public merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka dari itu harus dilakukan secara optimal. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik maka juga dibutuhkan lembaga atau organisasi yang menangani berbagai macam pelayanan public secara baik.

Salah satu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik di Surabaya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dispendukcapil Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia bersama sama menyediakan wadah beserta kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk melakukan pengembangan diri baik soft skill maupun hard skill melalui aktivitas yang diselenggarakan di luar kampus. MSIB bertujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa berupa praktek pembelajaran langsung di tempat kerja. Hal ini dilakukan agar peserta magang dapat mengembangkan diri serta memperoleh bekal dan wawasan terhadap dunia kerja. Magang ini dilakukan selama 1 semester dengan konversi minimal 20 SKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, dibantu dengan adanya mahasiswa magang MSIB, Dispendukcapil Surabaya terus melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya yaitu mengurus urusan pelaksana otonom daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, dan pengelolaan ketatausahaan dinas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman pemerintah Kota Surabaya juga berinisiasi untuk membenahi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Teknologi tersebut digunakan untuk memudahkan warga dan petugas dalam mengakses pelayanan mengenai kependudukan. Sehingga penerbitan dokumen dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Kartu Tanda Penduduk menjadi dokumen penting bagi setiap warga negara yang telah memasuki usia 17 tahun keatas. KTP digunakan sebagai identitas diri dan diakui secara nasional sebagai tanda kependudukan. Namun KTP (Kartu Tanda Penduduk) seringkali disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung

jawab. Kasus mengenai pemalsuan KTP juga masih terjadi. Contoh kasus penyalahgunaan penggunaan data pribadi seperti penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (skimming), pinjaman online atau Pinjol (Situmeang, 2021).

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya berupaya untuk melindungi data pribadi yang ada di KTP Elektronik masyarakat dengan menggunakan inovasi terbaru yaitu dengan menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Menurut Permadi et al., 2023 aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan layanan berbasis android yang diterapkan di smartphone sebagai alternatif selain fisik KTP elektronik. Dan sudah bisa digunakan di app store untuk para pengguna iphone. IKD perlu dilakukan sebagai pengganti KTP-el secara fisik karena pada awal 2024 nanti, Kemendagri alias Kementerian Dalam Negeri akan menghentikan pasokan blanko KTP-el. Maka dari itu, Dispendukcapil Surabaya melakukan inovasi pelayanan aktivasi IKD di balai – balai RW agar masyarakat Surabaya dapat dengan mudah melakukan aktivasi IKD.

Dari hasil penelitian awal, kebijakan mengenai pelayanan aktivasi IKD di balai- balai RW Kelurahan Kalirungkut belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Kenyataannya, implementasi kebijakan program pelayanan IKD masih belum berjalan secara optimal. Minat warga untuk melakukan aktivasi mengenai IKD masih minim. Tantangan lainnya yaitu masih banyak warga yang tidak memiliki perangkat android/ios yang support sehingga tidak bisa memiliki IKD. Dan SIAK yang merupakan sistem, terkadang masih teradi eror sehingga menghambat pelaksanaan program aktivasi IKD di balai – balai RW Kelurahan Kalirungkut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari judul “Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya” adalah menggunakan penelitian pendekatan kualitatif jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendapatkan data secara langsung dengan observasi dan wawancara saat melakukan survey di lapangan. Sehingga, lebih di fokuskan pada pembahasan implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) di balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dari tindakan social maupun kata kata dari pihak yang terkait dan data sekunder dari artikel jurnal dan sumber berita terpercaya. Penelitian ini dilakukan di kantor kelurahan dan balai RW Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya pada bulan februari – juni 2023. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu staff kelurahan dan masyarakat yang mengurus

Keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. (Subarsono. 2005: 89-101). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah, teori George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a) Komunikasi

Diperlukan adanya komunikasi yang baik dari setiap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

b) Sumberdaya

Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur dalam kehidupan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.

d) Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Peneliti membahas mengenai fenomena komunikasi dengan kejelasan, transmisi, dan konsistensi yang telah dilakukan penyesuaian dengan hasil penelitian. Yang pertama, dilihat pada transmisi dari aparaturnya terhadap petugas yang akan melaksanakan dan warga Kelurahan Kalirungkut. Transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menciptakan sebuah implementasi yang baik juga. Langkah ini merupakan langkah awal dari penyampaian informasi ini yang dilakukan agar pelaksana yaitu petugas dan penerimanya yaitu warga dapat mengetahui dan mengerti mengenai isi dari Program pelayanan IKD di balai-balai RW di Kelurahan Kalirungkut. Transmisi dalam program pelayanan IKD ini dilakukan menggunakan cara sosialisasi. Hasil dari observasi, survey lapangan dan interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kita simpulkan bahwa telah dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh tim petugas pelaksana pelayanan IKD. Sosialisasi ini dilakukan dengan baik hingga ke titik terbawah Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu (RT) Rukun Tetangga. Yang diharapkan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan mengerti mengenai pelayanan program IKD di balai RW masing – masing.

Yang kedua dilihat dari, kejelasan akan kebijakan atau program pelayanan IKD di balai RW Kelurahan Kalirungkut. Kejelasan informasi yang diterima harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan terhadap petugas yang akan melaksanakan program maupun masyarakat sebagai penerima programnya. Ketidakjelasan program akan menghambat implementasi kebijakan terjadi. Dari hasil observasi dan interview peneliti, diketahui jika tidak semua warga paham mengenai program pelayanan IKD ini. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program IKD.

Yang ketiga dilihat dari konsistensinya. Berdasarkan observasi, survey lapangan dan interview yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui jika informasi yang diberikan oleh aparaturnya sebagai atasan sudah konsisten. Jika ada informasi yang terbaru, langsung disampaikan terhadap petugas yang melakukan aktivasi IKD. Setelah itu, informasi tersebut akan diteruskan petugas terhadap hingga ke titik terbawah Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu (RT) Rukun Tetangga agar diteruskan kepada warganya.

2. Disposisi (Sikap)

Indikator yang pertama yaitu, penerimaan masyarakat terhadap implementasi program pelayanan IKD. Yang menjadi sasaran program (*target group*) pelayanan IKD adalah seluruh warga Kelurahan Kalirungkut yang memiliki perangkat android/ios yang support. Berdasarkan observasi, survey lapangan dan

interview yang telah dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa masyarakat kelurahan kalirungkut sangat senang dan terbantu dengan adanya pelayanan program IKD di balai – balai rw karena tidak perlu jauh jauh ke kelurahan untuk melakukan aktivasinya.

Indikator yang kedua yaitu, kepuasan masyarakat terhadap program pelayanan IKD di balai rw. Hasil dari observasi, survey lapangan dan interview yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masyarakat merasa puas dalam pelaksanaan program IKD di balai rw. Karena terkadang terjadi kendala system yang ada pada SIAK sehingga dapat menghambat implementasi pelayanan IKD di balai RW ini.

3. Sumber daya

Sumber daya pertama dalam implementasi program pelayanan IKD di balai rw adalah staff. Jika staff gagal dalam melakukan implementasi maka implementasi kebijakan program ini juga akan gagal. Karena staff memegang peranan paling penting dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan observasi, survey lapangan dan interview yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa SDM yang dimiliki oleh pelaksana program pelayanan sudah memadai. Ditambahi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh peserta magang MSIB Dikendukcapil Surabaya dan adanya bantuan koordinasi dari RT dan RW setempat sehingga dapat mempermudah implementasi program IKD di balai rw Kelurahan Kalirungkut.

Kesediaan fasilitas menjadi sumber daya yang perlu untuk disediakan. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai akan semakin mempermudah pelaksanaan implementasi. Fasilitas – fasilitas tersebut bisa berupa bangunan, peralatan, kemudian persediaan. Berdasarkan observasi, survey lapangan dan interview yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan program IKD dinilai sudah sangat memadai. Karena dilakukan di balai – balai RW Kelurahan Kalirungkut yang memiliki lokasi strategis dan telah dilengkapi computer dan wifi sehingga memudahkan pelaksanaan program IKD.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) di balai RW Kelurahan Kalirungkut menurut teori George C. Edwards III (1980) adalah faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pada program IKD di balai rw Kelurahan Kalirungkut sudah baik dan jelas arahnya. Dalam hal komunikasi, transmisi dalam program pelayanan IKD ini dilakukan menggunakan cara sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan baik hingga ke titik terbawah Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu (RT) Rukun Tetangga. Lalu mengenai kejelasan akan kebijakan atau program pelayanan IKD di balai RW Kelurahan Kalirungkut, telah dilakukan penyampaian informasi secara jelas melalui sosialisasi, namun masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai program IKD. Kemudian dilihat dari konsistensinya, informasi yang diberikan oleh aparaturnya sebagai atasan sudah konsisten.

Dalam hal sikap atau disposisi, penerimaan masyarakat terhadap implementasi program pelayanan IKD, masyarakat sangat senang dan terbantu dengan adanya pelayanan program IKD di balai – balai rw karena lebih terjangkau

daripada pergi ke kelurahan. Kemudian, kepuasan masyarakat terhadap program pelayanan IKD di balai rw, masyarakat merasa cukup puas dalam pelaksanaan program IKD di balai rw. Karena terkadang terjadi kendala system yang ada pada SIAK sehingga menghambat proses layanan IKD.

Pada faktor sumberdaya, manusia dalam hal ini staff sebagai SDM yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program ini sudah memadai. Ditambahi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh peserta magang MSIB Dispendukcapil Surabaya dan adanya bantuan koordinasi dari RT dan RW setempat. Kemudian dari segi penyediaan fasilitas, fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan program IKD dinilai sudah sangat memadai. Balai balai RW di Kelurahan Kalirungkut memiliki lokasi strategis dan telah dilengkapi computer dan wifi sehingga fasilitas tersebut menunjang pelaksanaan program IKD

DAFTAR PUSTAKA

- Permadi, I. B., Rokhman, A., & Soedirman, U. J. (2023). IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM UPAYA PENGAMANAN DATA PRIBADI. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Situmeang, S. M. T. (2021). PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER. *SASI*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>